



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1992

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 0216/D/1992  
TENTANG  
PENGBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegeration untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 226/M Tahun 1986;
  - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986,
  - d. Nomor 64/M Tahun 1988.
  - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0370/Q/1978 tanggal 22 Desember 1978,
  - b. Nomor 0371/Q/1978 tanggal 22 Desember 1978,
  - c. Nomor 090/Q/1979 tanggal 26 Mei 1979,
  - d. Nomor 02228/Q/1980 tanggal 11 September 1980;
  - e. Nomor 0173/Q/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - f. Nomor 0248/Q/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - g. Nomor 064/Q/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Menimbangku: 1. Perselejuaan Merluwi Negara Purnamadjiwan Agaratur Negara dengan surat Nomor 8-450/1/1392 tandaai 5 Mei 1992.  
2. Surat Kepala Wilayah Organisasi Negara 160/1/182/1392 tanggal 8 Mei 1992.

#### M E M U T U S A K A N

Menetapkan:

Pertama : Membuka Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjut Tingkat Akhir (SLTA) serta menegerikam SLTP dan SLTA sebagaimana telah memenuhi persyaratan menegurian menjadi SLTP dan SLTA resmi di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sebaik dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/Q/1978 tanggal 22 Desember 1978, Nomor 0371/Q/1978 tanggal 22 Desember 1978, dan Nomor 090/Q/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negri diwujudkan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah  
a. SMP Negeri 7.830 buah;  
b. SMA Negeri 2.141 buah;  
c. SMK Negeri 1 buah;  
d. SMIK Negeri 13 buah;  
e. SMPS Negeri 14 buah;  
f. SMEA Negeri 336 buah;  
g. RMT Pendidikan Negeri 21 buah.  
terdebat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 1992  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tuu

Fuad Hassan

Kabupaten Indramayu

Pangandaran

SMA Negeri 1

Bangodua

SMA Negeri 1

Jatisari

SMA Negeri 1

Telukjambe

SMA Negeri 1

Cilamaya

SMA Negeri 1

Cipanas

SMA Negeri 1

Leuwimunding

SMA Negeri 1

Bantarujek

SMA Negeri 1

Purwakarta

SMA Negeri 1

Wanayasa

SMA Negeri 1

Cilacap

SMA Negeri 1

Pegadaian

SMA Negeri 1

Demaraja

SMA Negeri 1

Sumedang

SMA Negeri 1

Kabupaten Indramayu

SMA Negeri 1

Kabupaten Karawang

SMA Negeri 1

Cilacap

SMA Negeri 1

Leuwimunding

SMA Negeri 1

Cilacap

SMA Negeri 1

Purwakarta

SMA Negeri 1

Cilacap

SMA Negeri 1

Cilacap